

**PENGAWASAN DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN**  
*(Studi Kasus Pembangunan Di Desa Jembatan Merah Kecamatan Tomilito Kabupaten Gorontalo Utara)*

**Oleh:**  
**RESKI AHMAD**  
**S2117130**

**SKRIPSI**

*Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna memperoleh Gelar Sarjana  
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik  
Universitas Ichsan Gorontalo*



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**  
**UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO**

**2021**

LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING  
PENGAWASAN DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN  
*(Studi Kasus Pembangunan Di Desa Jembatan Merah Kecamatan Tomilito Kabupaten Gorontalo Utara)*

Oleh:

RESKI AHMAD  
S2117130

SKRIPSI

Skripsi Ini Telah Memenuhi Syarat Yang Di Setujui Oleh Pembimbing Pada  
Tanggal 03 Mei 2021

Menyetujui

Pembimbing I

Dr. Fatma M. Ngabito, S.Ip., M.Si  
NIDN: 0924076701

Pembimbing II

Noviyanti Tue, S.Ip., M.Si  
NIDN: 0927128383801



## LEMBARAN PENGESAHAN PENGUJI

**PENGAWASAN DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN**  
(Studi Kasus Pembangunan Di Desa Jembatan Merah Kecamatan Tomilito  
Kabupaten Gorontalo Utara)

OLEH :

**RESKI AHMAD**  
S.21.17.130

SKRIPSI

Skripsi Ini Telah Memenuhi Syarat Yang Disetujui Oleh Pembimbing Pada  
Tanggal 3 Mei 2021

### TIM PENGUJI

1. Achmad Risa Mediansyah, S.Sos., M.SI
2. Sandi Prahara, S.T., M.Si
3. Darmawaty Abdul Razak, S.IP., M.AP
4. Dr. Fatmah M. Ngabito, S.IP., M.SI
5. Noviyanti Tue, S.IP., M.SI

*(Signature)*  
.....  
*(Signature)*  
.....  
*(Signature)*  
.....  
*(Signature)*  
.....  
*(Signature)*  
.....  
*(Signature)*  
.....

### MENGETAHUI



## PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi yang berjudul "Pengawasan Dalam Pelaksanaan Pembangunan ( Studi Kasus Pembangunan Di Desa Jembatan Merah Kecamatan Tomilito Kabupaten Gorontalo Utara ) adalah benar –benar asli dan merupakan karya sendiri yang belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar sarjana baik di Universitas Ichsan Gorontalo maupun perguruan Tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, rumusan dan penelitian sendiri tanpa bantuan dari pihak lain kecuali arahan dan saran pembimbing dan penguji pada saat ujian skripsi ini.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terbukti bila pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar yang saya peroleh.



## **ABSTRACT**

### **RESKI AHMAD. NIM S2117130. THE SUPERVISION OF DEVELOPMENT IMPLEMENTATION (A CASE STUDY ON THE JEMBATAN MERAH VILLAGE DEVELOPMENT PROJECT, TOMILITO SUBDISTRICT, NORTH GORONTALO DISTRICT)**

*The research is aimed at finding the supervision of development implementation at Jembatan Merah village, Tomilito Subdistrict, North Gorontalo District. The type of method used is the qualitative research with descriptive approach. The findings of the research indicate that 1) The Village Chief as a formal leader or the development project administrator has a very important role in requiring, mobilizing, and improving the participation of the people to actively contribute to the development project in their local village. Therefore, a need towards a competent, accountable, wise, knowledgeable and reliable chief of village must be supported by the qualified staffs of the village, 2) the Allocation of Village Fund is the aid from the Local Government of North Gorontalo District intended to fund the programs of local village government in their programs and in community development projects since the aid can help fund them to be realized. The amount of revenue within a community can affect the rate of their participation in local village development project particularly in the form of fundraising. This can be seen in the Village of Jembatan Merah where since the income rate is still relatively low, people's participation is, in consequence, insufficient 3) Education also effects the rate of participation of the community in the local development project where high educated people can help the chief of the village in conveying the information regarding the development program and on the other side, low educated people are have high contribution in the local development project in the form of physical and labor participation.*

*Keywords: Supervision, Village development*

## ABSTRAK

### **RESKI AHMAD. S2117130. PENGAWASAN DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN (STUDI KASUS PEMBANGUNAN DI DESA JEMBATAN MERAH KECAMATAN TOMILITO KABUPATEN GORONTALO UTARA)**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengawasan dalam pelaksanaan pembangunan di desa Jembatan Merah Kecamatan Tomilito Kabupaten Gorontalo Utara. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa: 1) Kepala Desa sebagai pemimpin formal yang merupakan administrator pembangunan mempunyai peranan yang sangat penting dalam membutuhkan, menggerakkan dan meningkatkan partisipasi masyarakat untuk ikut aktif dalam kegiatan pembangunan desa. Oleh karena itu, diperlukan Kepala Desa yang cakap, jujur, bijaksana dan mempunyai pengetahuan dan keterampilan dalam menyelenggarakan pemerintahan desa serta dilengkapi dengan perangkat desa yang berkualitas; 2) Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan dana bantuan Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara yang dimaksudkan untuk membiayai program pemerintah desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintah dan pemberdayaan masyarakat, karena dengan bantuan ini dapat membantu terlaksananya pembangunan desa dalam hal pembiayaan atau pembangunan. Tingkat pendapatan yang dimiliki oleh suatu masyarakat akan mempengaruhi tingkat partisipasi mereka dalam pembangunan desa, khususnya dalam bentuk swadaya uang. Seperti yang ada di Desa Jmebatan Merah dimana tingkat pendapatan masih rendah, hal ini berpengaruh terhadap tingkat partispasinya masih rendah atau kurang; 3) Pendidikan juga mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa, dimana masyarakat yang berpendidikan tinggi dapat membantu memudahkan upaya Kepala Desa dalam menyampaikan informasi tentang program pembangunan, dan disisi lain masyarakat berpendidikan rendah sangatlah membantu dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan pembangunan dalam hal partisipasi dalam bentuk tenaga.

**Kata Kunci:** Pengawasan, pembangunan Desa

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### **MOTTO:**

- Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala (dari kebaikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahanan) yang dikerjakannya... (QS. Al-Baqarah:286).
- Maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain, dan hanya kepada Tuhanmu lah hendaknya kamu berharap (QS. Al-Insyirah: 7-8).
- Orang yang pesimis melihat kesulitan dalam setiap kesempatan. Orang yang optimis melihat kesempatan dalam setiap kesulitan (Agus Dharma).

### **PERSEMBAHAN:**

- Karya Tulis Ilmiah ini kupersembahkan untuk:
- Ayah dan Ibunda tercinta Kasno dan Reni Hartati serta adik-adikku Risma Sakti Pambudi dan Rasyid Sidik Prabowo tersayang yang telah banyak berkorban dan memotivasi dalam penyelesaian Proposal Karya Tulis Ilmiah
  - Sahabat-sahabatku Anjarsari Haspitaningrum dan Fani Mayasari tersayang yang tak pernah lelah mendukung, memotivasi serta memberi nasehat
  - temanku rizka nurlaela yang selalu mendampingiku dan menemani pelaksanaan penelitian
  - Teman-teman DaKoCAN 2008 (Daerah Komunitas Cah A1 Angkatan 2008) yang selalu menyemangati dan memotivasi.

## KATA PENGANTAR

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Alhamdulillahirabbil'alamin, Hamdan Syukron Lillah, dengan segala kerendahan hati, penulis panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, karena atas izin, rahmat serta hidayahNya, sebagai tanda kasih sayang terhadap hamba-Nya. Dalam konteks kehidupan ini, umur kesehatan dan juga kekuatan adalah suatu kenikmatan tersendiri yang di berikan oleh-nya sehingga penulisan Skripsi yang berjudul **“ Pengawasan Dalam Pelaksanaan Pembangunan ( Studi Kasus Di Desa Jembatan Merah Kecamatan Tomilito Kabupaten Gorontalo ”**. Dapat diselesaikan.

Penulisan Skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat Program Strata I pada Jurusan Ilmu Pemerintahan di Universitas Ichsan Gorontalo. Selama penulisan skripsi, penulis menyadari karya ini tidak terlepas dari peran serta bantuan dari semua pihak terkait. Dalam hal ini, penulis menyampaikan rasa terimakasih yang mendalam kepada kedua orang tua tercinta dengan penuh rasa kasih sayang, Ibu Hapsa Tahidina yang telah memberikan dukungan, motivasi dan doa restu selama menempuh perkuliahan hingga ketahap ini.

Tidak lupa juga ucapan terimakasih kepada berbagai pihak Bapak Mohamad Ichsan Gaffar S.E, M.AK selaku ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Teknologi (YPIPT) Ichsan Gorontalo. Bapak Dr. Abdul Gaffar La Tjokke, M.SI selaku rektor Universitas Ichsan Gorontalo. Dr. Arman, S.Sos. M.SI selaku Dekan Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Ibu Darmawati Abdul Razak, S.IP, M.AP selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Ichsan Gorontalo. Kepada Ibu Dr. Fatma Ngabito S.IP, M.SI Dan Ibu Noviyanti Tue, S.Ip., M.Si selaku pembimbing I dan pembimbing II yang telah memberi arahan, kritik dan saran serta masukan selama penulisan skripsi, Bapak Ibu Dosen Fakultas ilmu sosial dan ilmu politik. Serta teman-teman seperjuangan rekan-rekan mahasiswa jurusan Ilmu Pemerintahan ankatan 2017

Semoga bantuan dan dorongan yang penulis terima dari berbagai pihak akan mendapatkan imbalan, berkah dan ridho dari Allah SWT, dan untuk penulis dapat dijadikan arahan untuk masa depan yang lebih baik.

Akhir kata, penulis berharapa agar skripsi ini berguna bagi para pembaca dan pihak-pihak lain yang berkepentingan.

Gorontalo Maret 2021  
Penulis

REKI AHMAD  
NIM .S.21.17.130

## DAFTAR ISI

Halaman Judul .....	1
Lembar Pengesahan Pembimbing .....	ii
Lembar Pengesahan Penguji .....	iii
Surat Pernyataan .....	iv
Abstrak .....	v
Abstrac .....	vi
Moto Dan persembahan .....	vii
Kata Pengantar .....	viii
Daftar Isi .....	x
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	4
1.3 Tujuan Penelitian .....	5
1.4 Kegunaan Penelitian .....	5
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>6</b>
2.1 Pengertian Pengawasan .....	6
2.2 Faktor Yang Mendukung Pengawasan .....	10
2.3 Pembangunan .....	13
2.4 Good Governance .....	16
2.5 Kedudukan Pengawasan Dalam Pembangunan Desa .....	17
2.6 Kerangka Pikir .....	18
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>20</b>
3.1 Jenis Penelitian .....	20
3.2 Fokus Penelitian .....	20
3.3 Informasi Penelitian .....	21
3.4 Sumber Data .....	22
3.5 Teknik Pengumpulan Data .....	22
3.6 Analisis Data .....	23

<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>27</b>
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	27
4.2 Hasil Penelitian Dan Pembahasan .....	30
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>40</b>
5.1 Kesimpulan .....	40
5.2 Saran .....	41

**DAFTAR PUSTAKA**  
**LAMPIRAN**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Dalam sebuah organaisasi sangatlah dibutuhkan pengawasan apabila ingin mewujudkan tujuan organisasi. Manajemen berfungsi sebagai control atau pengawasan untuk melihat apakah pelaksanaan kegiatan dalam organisasi berjalan sesuai aturan organisasi. Penyimpangan dalam organisasi dapat diatasi karena sering dipantau kegiatannya.

Tujuan pengawasan adalah untuk menghindari terjadinya penggelapan atau penyimpangan, sehingga perencacanaan yang telah disusun secara efektif dan efesien dapat dicapai. Melalui pengawasan dapat memantau penyelenggaraan kebijakan dan penyalahgunaan kebijakan, dan dapat terdeteksi sedini mungkin.

Transfaransi merupakan salah satu unsur yang mutlak dilakukan. Dengan adanya keterbukaan dalam semua aspek yang berhubungan dengan kepentingan public dari mulainya proses sampai pada akhir dari proses pengawasan, hal ini sangat berpengaruh kepada meningkatnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Keterbukaan dalam sebuah organisasi, akan menghasilkan kondisi yang sebenarnya dapat dilihat oleh semua unsur, sehingga pihak pihak yang berkepentingan dapat mengukur kondisi yang sebenarnya dan dapat mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan.

Apabila peningkatan kerja telah tercapai maka proses pelaksanaan pekerjaan tentunya akan jadi semakin baik. Karena salah satu poin yang menentukan

berhasil tidaknya suatu pembangunan di daerah adalah pengawasan, apabila pengawasannya baik maka hasilnya baik. Begitu juga sebaliknya.

Pembangunan yang ideal harusnya lebih dilihat pada daerah itu sendiri, karena dengan melihat daerah itu sendiri maka pemerintah akan mengetahui pembangunan apa yang sangat dibutuhkan oleh daerah itu. Hal ini guna tercapainya kemakmuran dan kemajuan desa tersebut. Didalam suatu perencanaan pembangunan kita maupun pemerintah tentunya akan berharap ada perubahan kesejahteraan rakyat dengan adanya pembangunan tersebut karena dengan pembangunan itu sendiri bisa meningkatkan kesejahteraan rakyat itu sendiri. Yang pasti pemerintah harus mengetahui kondisi desa dan rakyat sebelum merencanakan apapun. Agar pembangunan yang akan dibuat nanti bisa benar-benar kena sasaran dan bermanfaat bagi masyarakat.

Namun tak bisa dipungkiri kenyataan dilapangan pelaksanaan pengawasan banyak mengalami kendala realitapenyelengaraan pengawasan pembangunan membuktikan bahwa masalah atau faktor organisasi dan managemen ini masih merupakan titik yang rawan. Dimana yang harusnya pemerintah itu yang mengawasi namun justru pemerintah yang menyalahguanakan kekuasaan tersebut. Sementara itu seringkali pembangunan yang dibuat tidak begitu baik bahkan seringkali demi pembangunan suatu masyarakat menjadi korban dari pembangunan itu sendiri bahkan tidak banyak dari mereka bahkan menderita akibat pembangunan itu sendiri baik itu disebabkan karena lingkungan yang tadinya mendukung kehidupan penduduk disekitar tersebut berubah menjadi suatu keadaan yang baru yang mempengaruhi kehidupan sehari-hari mereka. Bangunan

yang dibuat pemerintah harusnya menolong masyarakat justru bertolak belakang hal ini dikarenakan buruknya sistem pengawasan dari pemerintah mengakibatkan bengunan yang dibuat tidak sesuai harapan.

Berdasarkan pengamatan awal penulismengenai pembangunan drainase di Desa Jembatan Merah menunjukan bahwa pembangunan yang ditargetkan 10 tahun namun baru dalam 2 tahun sudah banyak mengalami kerusakan, bahkanada yang pekerjaannya belum selesai, akibatnya bangunan yang justru mengaliri air karena sudah mulai rusak akibatnya saluran air jadi terhambat dan tiidak berjalan dengan baik, akibatnya luapan air terjadi dimana-mana. Sehingga pembangunan draenase tersebut tidak memberikan dampak positif terhadap penanggulangan banjir atau dengan kaitannya bahwa pengawasan tersebut tidak efektif, unutk memenuhi kebutuhan masyarakat, berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian : “ ***Pengawasan dalam Pelaksanaan Pembangunan (Studi kasus pembangunan di Desa Jembatan Merah, Kecamatan Tomilito Kabupaten Gorontalo Utara)***”.

## 1.2 Rumusan Masalah

Untuk memberikan arah yang jelas tentang pembahasan yang dilakukan dalam penelitian ini, maka penulis mengemukakan beberapa rumusan masalah :

1. Bagaimana pengawasan pemerintah desa, dan tokoh-tokoh masyarakat terhadap pelaksanaan pembangunan di Desa Jembatan Merah.
2. Faktor- apa yang menghambat pemerintah desa, dan tokoh-tokoh masyarakat dalam proses pengawasan pelaksanaan pembangunan di Desa Jembatan Merah.

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian yang akan dicapai dengan dilaksanakannya penelitian ini antara lain :

1. Untuk mengetahui bagaimana pengawasan pemerintah desa, dan tokoh-tokoh masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Jembatan Merah.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa yang menghambat pengawasan pemerintah desa dan tokoh-tokoh masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Jembatan Merah.

### **1.4 Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan penelitian tersebut diatas, maka kegunaan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Teoritis  
Memperdalam pengetahuan peneliti dibidang pemerintahan khususnya dalam pengawasan pelaksanaan pembangunan di Desa Jembatan Merah.
2. Praktis
  - a. Bagi pemerintah desa bahwa hasil penelitian ini sebagai bahan informasi dalam upaya untuk meningkatkan kemajuan dan efektifnya pembangunan di Desa.
  - b. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan kajian dalam rangka ikut serta mengawasi dan sumbang saran terhadap pemerintah desa dalam mengawasi pembangunan desa.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Pengertian Pengawasan**

Menurut Robien dalam Safiie, (2011 : 10) “pengawasan dapat diartikan sebagai proses mengikuti perkembangan kegiatan untuk menjamin jalannya pekerjaan, dengan demikian dapat selesai secara sempurna sebagaimana yang direncanakan sebelumnya, dengan pengoreksian beberapa pemikiran yang saling berhubungan”.

Sedangkan Muninjaya (2004 : 90)“ pengawasan merupakan fungsi yang terakhir dari proses managemen, fungsi ini mempunyai kaitan erat dengan fungsi lainnya, terutama dengan fungsi perencanaan, melalui fungsi pengawasan dan pengendalian, standar keberhasilan program yang dituangkan dalam bentuk target, jika ada kesengajaan atau penyimpangan yang terjadi harus segera diatasi”.

Menurut Syafie (2011 : 112)”pengawasan adalah salah satu fungsi dalam managemen pemerintahan untuk menjamin agar pelaksanaan kerja pemerintah berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dalam perencanaan pemerintahan, agar masyarakat serta warga bangsa mencapai keadaan adil makmur dalam waktu yang sudah ditentukan bersama.”

Sedangkan menurut Handoko (2003 : 359)”pengawasan adalah sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan managemen tercapai. Ini berkenaan dengan cara-cara membuat kegiatan sesuai yang direncanakan.” Sementara itu menurut Komaruddin “pengawasan adalah berhubungan dengan

perbandingan antara pelaksana aktual rencana, dan awal untuk langkah perbaikan terhadap penyimpangan dan rencana yang berarti.”

Menurut Kadarmann (2001)” pengawasan adalah suatu upaya yang sistematis untuk menetapkan kinerja standar pada perencanaan untuk merancang sistem umpan balik informasi, untuk membandingkan kinerja aktual dengan standar yang telah ditentukan, untuk menetapkan apakah telah terjadi suatu penyimpangan tersebut, serta untuk mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan telah digunakan seefektif dan seefesien mungkin guna mencapai tujuan perusahaan.”

Melihat dari uraian diatas maka penulis menyimpulkan bahwa pengawasan adalah kegiatan mengawasi atau mengontrol terhadap suatu organisasi atau suatu pekerjaan agar kegiatan yang dijalankannya apakah sudah benar-benar sesuai prosedur atau belum, nantinya apa yang kita awasi dilapangan tentunya akan menjadi bahan laporan kita nanti.

Menurut itu Terry dan Winardi (2006 : 395)”Pengawasan dapat dianggap sebagai aktifitas untuk menemukan, mengoreksi penyimpangan-penyimpangan yang penting dalam hasil yang dicapai dari aktivitas-aktivitas yang direncanakan.”

### **2.1.1. Jenis-Jenis Pengawasan**

Menurut Muninjaya (2004 : 95) ada tiga jenis pengawasan managerial yang berkembang pada organisasi pemerintahan di Indonesia yaitu :

- a. Pengawasan fungsional ( Struktural )

Fungsi pengawasan ini melekat pada seseorang yang menjabat sebagai pimpinan lembaga peranan setiap pimpinan adalah melakukan

pengawasan terhadap semua kegiatan staf yang dibawah koordinasinya. Semakin tinggi tingkatan manajer akan semakin luas objek dan aspek pengawasannya, terutama yang bersifat strategis.

b. Pengawasan publik

Pengawasan ini dilakukan oleh masyarakat terhadap jalannya pembangunan pada umumnya. Biasanya dilakukan melalui media massa, atau kotak pos 5000.

c. Pengawasan non fungsional

Fungsi pengawasan yang sifatnya non fungsional biasanya dilakukan oleh badan-badan yang diberikan kewenangan untuk melakukan pengawasan (fungsi sosial kontrol) seperti DPR, Badan Penawasan Keuangan (BPK) Negara, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan fungsi Inspektorat yang ada di masing-masing Departemen, baik ditingkat pusat maupun ditingkat Provinsi.

Handoko (2003 : 361) mengemukakan bahwa, ada tiga tipe dasar pengawasan yaitu :

1. Pengawasan pendahuluan (feedforward control). Pengawasan pendahuluan atau sering disebut steering controls, dirancang untuk mengantisipasi masalah-masalah atau penyimpang-penyimpangan dari standar atau tujuan dan memungkinkan koreksi dibuat sebelum suatu tahap kegiatan tertentu diselesaikan.
2. Pengawasan yang dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan kegiatan (concurrent control). Pengawasan ini sering disebut pengawasan “ya-tidak

”screening control atau “berhenti-terus”, dilakukan selama suatu kegiatan berlangsung.

3. Pengawasan umpan balik (feedback control). Pengawasan umpan balik, juga dikenal sebagai fast-action control. Mengukur hasil-hasil dari suatu kegiatan yang telah diselesaikan.

### **2.1.2. Tujuan Dan Manfaat Pengawasan**

Menurut Fattah (2004 :103) tujuan pengawasan menurut konsep sistem adalah membantu mempertahankan hasil atau output yang sesuai syarat-syarat system. Sedang menurut Muninjaya (2004 : 91) manfaat pengawasan terdiri atas lima yaitu :

1. Dapat mengetahui sejauh mana kegiatan program sudah dilaksanakan oleh staf, apakah sesuai dengan standar atau rencana kerja, apakah sumber dayanya sudah digunakan sesuai dengan yang telah ditetapkan.
2. Dapat mengetahui adanya penyimpangan pada pemahaman staf melaksanakan tuugas-tugasnya, jika hal ini diketahui, pimpinan organisasi akan memberikan pelatihan lanjutan bagi stafnya. Latihan staf digunakan untuk mengatasi kesenjangan pengetahuan dan keterampilan staf yang terkait dengan tugas-tugasnya.
3. Dapat mengetahui apakah waktu dan sumber daya lainnya mencukupi kebutuhan dan telah dimanfaatkan secara evisien.
4. Dapat mengetahui sebab-sebab terjadinya penyimpangan.
5. Dapat mengetahui staf yang perlu di berikan penghargaan, di promosikan atau di berikan pelatihan lanjutan.

Menurut Muninjaya (2004 : 96)"fungsi pengawasan perlu di bedakan dengan evaluasi yang juga sering di lakukan untuk mengetahui kemajuan pelaksanaan program, pemberdayaan terletak pada sasarannya, antara evaluasi dengan fungsi pengawasan juga mempunyai kesamaan tujuan yaitu untuk memperbaiki efektivitas pelaksanaan program dengan memperbaiki fungsi manajemen."

Sistem pengawasan dilakukan untuk memonitor fungsi-fungsi atau proyek-proyek organisasional. Pengawasan terhadap suatu fungsi dimaksudkan untuk menjamin bahwa kegiatan tertentu dilaksanakan dengan tepat. Pengawasan dalam suatu proyek akan menjamin bahwa hasil akhir tertentu telah dicapai atau diselesaikan. (Handoko 2003 : 380).

## **2.2 Faktor Yang Mendukung Pengawasan**

Menurut Abdurahman dalam syafiie, (2011 : 110) mengatakan bahwa ada beberapa faktor membantu pengawasan dan mencegah berbagai kasus penyelewengan serta penyalahgunaan wewenang, yaitu :

- 1) Filsafat yang diasut suatu bangsa
- 2) Agama yang mendasari seseorang tersebut
- 3) Kebijakan yang dijalankan
- 4) Anggaran pembiayaan yang mendukung
- 5) Pendapat pegawai dan prosedur kerja
- 6) Kemantapan dalam koordinasi

Didalam himpunan peraturan perundang-undangan pemerintah desa dan kelurahan yaitu pada Bab X Pasal 24 ayat 2 yaitu pemerintah kabupaten/kota dan

camat wajib membina dan mengawasi pelaksanaan, pengelolaan keuangan desa. Serta pada Pasal 25 yaitu pembinaan dan pengawasan pemerintah kabupaten/kota sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 24 yaitu :

- a) Memberikan pedoman dan bimbingan pelaksanaan ADD (alokasi dana desa).
- b) Memberikan bimbingan dan pelatihan dan penyelenggaraan keuangan desa yang mencakup perencanaan dan penyusunan APBD, pelaksanaan dan pertanggung jawaban APBD.
- c) Membina dan mengawasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa.
- d) Memberikan pedoman dan bimbingan pelaksanaan administrasi keuangan desa.

Menurut Kaho (2010 : 281-287) ada beberapa yang membantu pengawasan dalam otonomi daerah yaitu :

1. Partisipasi masyarakat, salah satu wujud rasa tanggung jawab dimaksudkan adalah adanya sikap mendukung dari anggota masyarakat Daerah terhadap penyelenggaraan otonomi daerah yang ditunjukan dengan adanya partisipasi aktif masyarakat desa.
2. Faktor keuangan, keberhasilan penyelenggaraan otonomi Daerah tidak dapat dilepas dari cukup tidaknya kemampuan daerah dalam bidang keuangan karena kemampuan keuangan ini merupakan salah-satu indikator penting guna mengukur tingkat ekonomi suatu daerah.

3. Faktor peralatan, peralatan merupakan instrumen dan pembantu bagi aparatur pemerintah daerah dalam melaksanakan berbagai tugas pekerjaannya, karena itulah peralatan mendudukin posisi penting pula.
4. Faktor organisasi dan manajemen, untuk dapat mewujudkan suatu organisasi yang baik dan sehat maka dalam setiap organisasi perlu diterapkan asas-asas atau prinsip-prinsip tertentu, karena asas ini merupakan sarana perantara guna menciptakan iklim yang favourable bagi terwujudnya tujuan organisasi secara keseluruhannya.

Dengan melihat uraian diatas penulis menyimpulkan bahwa faktor yang mendukung pengawasan sebenarnya ada pada diri kita sendiri. Walaupun peralatan tidak secanggih mungkin, walaupun partisipasi masyarakat tidak terlalu mendukung, walaupun tidak ada undang-undang yang mengatur, tetapi kalau kita memang sudah ada niat baik tentunya proses pembangunan yang baik itu tak perlu diawasi. Tetapi itulah manusia mereka tidak bakalan kerja dengan baik kalau tidak diawasi, maka dari itu partisipasi, peralatan, dan peraturan undang-undang tentang pengawasan sangat dibutuhkan karena guna mencapai pelaksanaan organisasi yang baik.

## **2.2.Faktor yang menghambat pengawasan**

Menurut Tead dalam Syafie (2011 : 40)"kepemimpinan sebagai perpaduan perangi yang memungkinkan seseorang mampu mendorong pihak lain menyelesaikan tugasnya." Sedangkan menurut Pigors dalam Syafie (2011 : 40)"kepemimpinan adalah suatu proses saling mendorong melalui keberhasilan interaksi dari perbedaan individu, mengontrol daya manusia dalam mengajak

tujuan bersama.”Menurut Josef Riwu Kaho (2010 : 71)”berhasil tidaknya seorang yang menjabat sebagai kepala daerah tergantung kepada kualitas yang dimiliknya.”

Dalam kaitannya dengan hal ini, Poter dan Olsen dalam Kaho (2010:73)”menyatakan bahwa akibat pelaksanaan dari desentralisasi maka seorang kepala daerah harus berkualitas sebagai seorang gereralist, sebaliknya sebagai alat pemerintah pusat maka ia diharapkan menjadi seorang *specialist*.”

### **2.3 Pembangunan**

Riyadi, Deddy Supriady Bratakusumah (2004 : 6)”mengatakan perencanaan pembangunan merupakan suatu tahapan awal dalam proses pembangunan, sebagai tahapan awal, perencanaan pembangunan akan menjadi bahan/pedoman/acuan dasar bagi pelaksanaan kegiatan pembangunan (action plan).”

Menurut Sjafrizal, “secara umum perencanaan pembangunan adalah cara atau teknik untuk mencapai tujuan secara tepat, terarah, dan efisien sesuai dengan kondisi negara atau daerah bersangkutan. Karena itu perencanaan pembangunan hendaklah bersifat *implementif* (dapat dilaksanakan) dan *aplikatif* (dapat diterapkan).”

Kemudian ML Jhingan, “pembangunan pada dasarnya adalah merupakan pengendalian dan pengaturan perekonomian dengan sengaja oleh suatu penguasa (pemerintah) pusat untuk mencapai suatu sasaran dan tujuan tertentu didalam jangka waktu tertentu pula.”

Dengan melihat uraian diatas maka penulis beranggapan bahwa perencanaan pembangunan tidak mungkin hanya dilakukan diatas meja, tanpa melihat

realitas dilapangan. Data-data real dilapangan sebagai data primier merupakan ornamen-ornamen penting yang harus ada dan digunakan menjadi bahan dalam kegiatan perencanaan pembangunan. Dengan demikian perencanaan pembangunan dapat diartikan sebagai suatu proses perumusan alternatif-alternatif atau keputusan-keputusan yang didasarkan pada data-data dan fakta-fakta yang akan digunakan sebagai bahan untuk melaksanakan suatu rangkaian kegiatan kemasyarakatan, baik yang bersifat fisik maupun non fisik, dalam rangka mencapai tujuan yang lebih baik.

Sementara itu Ginanjar Karta Sasmita “pembangunan, yaitu sebagai suatu proses perubahan kearah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana.”

#### **2.4.1 Manfaat Pembangunan**

Manfaat dari pada pembangunan menurut Dissaynake, ”mengatakan pembangunan sebagai proses perubahan sosial yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup dari seluruh atau mayoritas masyarakat tanpa merusak lingkungan alam dan cultural tempat mereka berada dan berusaha melibatkan sebanyak mungkin anggota masyarakat dalam usaha ini dan menjadikan mereka penentu dari tujuan mereka sendiri.”

#### **2.4.2. Hambatan Umum Dalam Pembangunan**

Pembangunan pada prinsipnya adalah suatu proses dan usaha yang dilakukan oleh suatu masyarakat secara sistematis untuk mencapai situasi atau kondisi yang lebih baik dari saat ini. Dilaksanakannya proses pembangunan ini tidak lain karena masyarakat merasa tidak puas dengan keadaan saat ini yang

dirasa kurang ideal. Namun demikian perlu disadari bahwa pembangunan adalah sebuah proses evolusi, sehingga masyarakat yang perlu melakukan secara bertahap sesuai dengan sumber daya yang dimiliki dan masalah utama yang sedang dihadapi.

Berdasarkan dengan pembangunan desa maka ada beberapa masalah yang sering kali ditemui di berbagai desa, perlu mendapat [erhatian dan segera dia antipasi,diantaranya :

- a. Terbatasnya ketersediaan sumber daya manusia yang baik dan profesional;
- b. Terbatasnya ketersediaan sumber-sumber pembiayaan yang memadai, baik yang berasal dari kemampuan desa itu sendiri (internal) maupun sumber dana dari luar (eksternal);
- c. Belum tersusunnya kelembagaan sosial kurang ekonomi yang mampu berperan secara efektif;
- d. Belum terbangunnya sistem dan regulasi yang jelas dan tegas;
- e. Kurangnya kreativitas dan partisipasi masyarakat secara lebih kritis dan rasional.

## 2.4 Good Governance

Work Bank dalam Ismatulah (2010 : 178)" mengemukakan *governance* sebagai *the way state power is used in managing economic and social resource for development society*, pengertian ini menggambarkan bahwa governance adalah cara kekuasaan Negara untuk mengelola sumber-sumber daya ekonomi dan social guna membantu masyarakat cara ini lebih menunjukan pada hal-hal yang bersifat teknis."

Berkaitan dengan *good governance*, UNDP dalam Ismatulah (2010 : 180-182)" mengajukan Sembilan karakteristik dan salah satunya adalah Partisipasi (*participation*) adalah sebagai pemilik kedaulatan, setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban untuk mengambil bagian dalam proses bernegara, pemerintah, serta bermasyarakat, dan juga Transparansi (*Transparancy*) salah satu karakteristik *good governance* adalah keterbukaan, karakteristik ini sesuai dengan zaman yang serba terbuka adanya revolusi informasi, keterbukaan tersebut mencakup semua aspek aktifitas yang menyangkut kepentingan public dari proses pengambilan keputusan, penggunaan dana tahapan evaluasi."

Dengan melihat uraian diatas maka penulis berpendapat bahwa *good governance* adalah patokan untuk memperdekat masalah pengelolaan manajemen pemerintahan dalam membangun pemerintahan, oleh karena itu *good governance* menjadi sebuah konsep tentang cara memperkuat hubungan antara pemerintah, dan masyarakat dalam menjalankan kesejahteraan masyarakat.

## **2.5 Kedudukan Pengawasan Dalam Pembangunan Desa**

Kedudukan pengawasan dalam pembangunan desa adalah pemerintah desa itu sendiri Kepala Desa berkedudukan sebagai kepala pemerintah di desa, yang berada langsung di bawah Bupati dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Camat. Kepala Desa mempunyai fungsi pemimpin penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan. Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta tugas-tugas lain yang dilimpahkan kepada desa.

Dalam mencapai pemerintahan yang baik, maka pemerintah desa harus bekerja sama dengan BPD. Hubungan kerja Pemerintah Desa dengan BPD adalah bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif. Bersifat *kemitraan* artinya Kepala Desa dan BPD selalu mengembangkan prinsip kerjasama yang harmonis dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di desa. Bersifat *konsultatif* artinya bahwa kepala desa dan BPD senantiasa mengembangkan prinsip musyawarah dan konsultasi yang intensif dalam pelaksanaan kegiatan. Bersifat “*koordinatif*” artinya bahwa kepala desa dan BPD selalu mengembangkan prinsip musyawarah dan koordinasi yang intensif dalam pelaksanaan kegiatan.

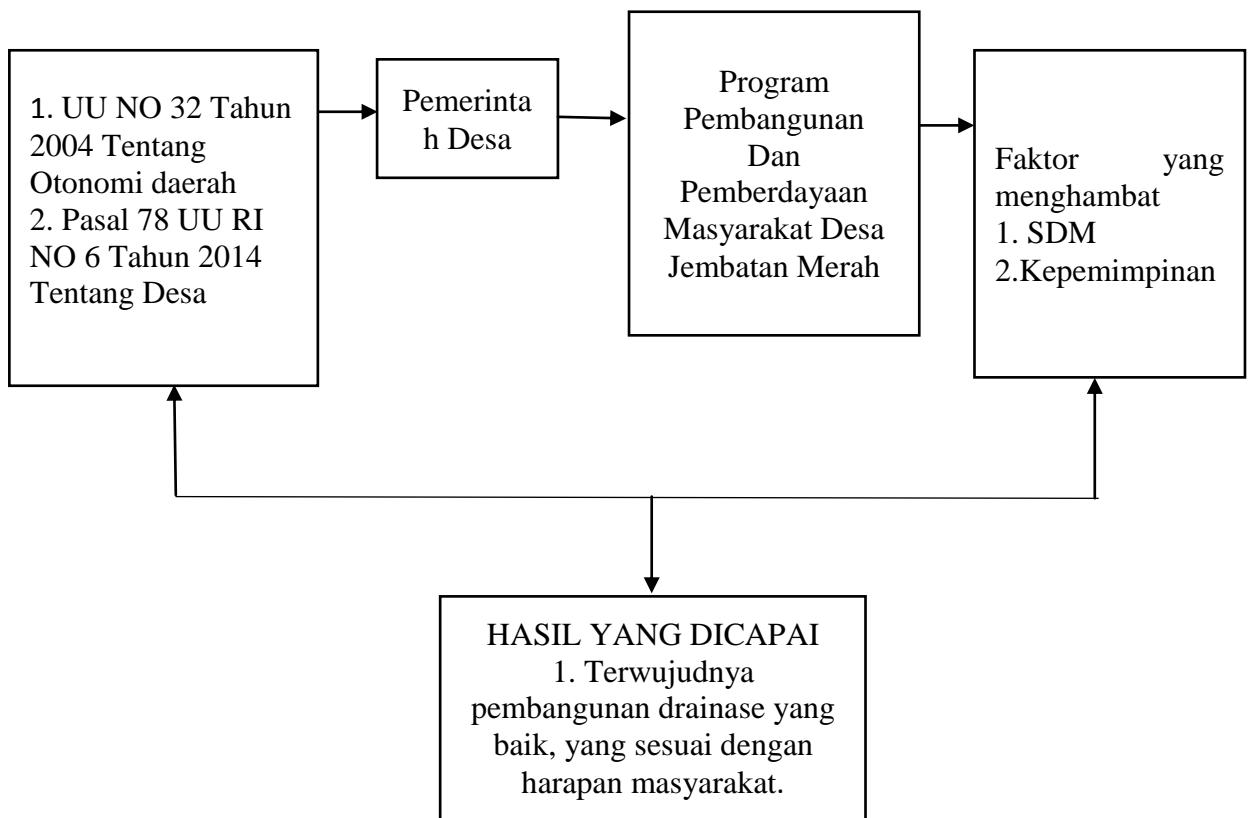
## **2.6 KerangkaPikir**

Pengawasan adalah sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen tercapai. Sesuai amanat Undang-Undang No 6.Tahun 2014 tentang Desa. Ini berkenaan dengan cara-cara membuat kegiatan sesuai yang direncanakan. Dan salah satu teori tentang pembangunan yaitu menurut Ginanjar Kartasasmita memberikan pengertian yang lebih sederhana tentang perencanaan pembangunan, yaitu sebagai suatu proses perubahan kearah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana.

Sesuai dengan Undang-undang dan teori diatas maka pemerintah desa melaksanakan suatu program pembangunan, yaitu pembuatan draenase di Desa Jembatan Merah, dimana dalam program pembangunan ini tentunya akan mengalami kendala yaitu faktor yang mendukung dan yang menghambat, salah satu yang mendukung pengawasan adalah masyarakat. Dan ada juga faktor yang

menghambat jalannya program pembangunan, yaitu masalah SDM, yaitu kurangnya kemampuan dari pada anggota atau tim pengawas dalam melaksanakan tugasnya tentunya menjadi salah satu faktor yang sangat mempengaruhi pelaksanaan pengawasan tersebut. Namun apabila faktor yang mendukung dapat berjalan baik, dan faktor yang menghambat dapat diatasi maka program pembangunan pemerintah dapat dicapai sesuai hasil yang diinginkan.

Sehubungan dengan uraian diatas, maka penulis menggambarkan alur piker sebagai berikut :



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Berdasarkan permasalahan penelitian yang dikemukakan sebelumnya, maka penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau tulisan dari orang-orang dan perilaku diamati. Penelitian ini juga menggunakan tipe penelitian Studi Kasus. Adapun lamanya penelitian ini kurang lebih tiga Bulan.

#### **3.2 Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang serta rumusan masalah yang ditentukan, maka yang menjadi fokus penelitian ini adalah Pemerintah Desa Jembatan Merah, Serta Tokoh-tokoh masyarakat yang terkait dalam pengawasan pelaksanaan Pembangunan Draenase di Desa Jembatan Merah, dan apakah pembuatan pembangunan draenase sudah sesuai dengan RAB (Rencana anggaran biaya), sehingga penelitian ini difokuskan pada :

1. Bagaimana sistem pengawasan (perencanaan, pelaksanaan) yang dilaksanakan oleh pemerintah desa, BPD, serta tokoh-tokoh masyarakat Terhadap Pelaksanaan Pembangunan Draenase di Desa Jembatan Merah.
2. Faktor apa yang menghambat pemerintah desa, BPD, serta tokoh-tokoh masyarakat di dalam proses pengawasan (Perencanaan, pelaksanaan) Pembangunan Draenase di Desa Jembatan Merah.

### 3.3 Informan Penelitian

Penelitian ini tidak menggunakan angka dalam mengumpulkan data dan dalam memberikan penafsiran terhadap hasil penelitiannya. Menurut Sugiono (2017)"Responden dalam metode penelitian kualitatif berkembang terus (snowball) atau bola salju yang menggelinding semakin lama semakin besar secara bertujuan (*purposive*) sampai data yang dikumpulkan dianggap memuaskan." Alat pengumpul data atau instrumen penelitian dalam penelitian kualitatif adalah si peneliti sendiri. Jadi peneliti merupakan *key instrument* dalam mengumpulkan data maka peneliti terjun sendiri kelapangan secara aktif.

Pada penelitian ini yang menjadi *informan* adalah mereka yang mempunyai kaitan erat dengan proses Pengawasan terkait dengan pembangunan Draenase khususnya di desa Jembatan Merah, Kecamatan Tomilito, Kabupaten Gorontalo Utara.

**Tabel 1**

Jumlah informal

No	Informan	Jumlah
1.	Kepala Desa Jembatan Merah	1 orang
2.	Ketua BPD	1 orang
3.	Ketua PK (Pelaksana Kegiatan)	1 orang
4.	Ketua TPK (Tim Pengelola Kegiatan)	1 orang
5.	Tokoh Masyarakat	2 orang
	Jumlah	6 orang

### **3.4 Sumber Data**

#### **1. Data Primer**

Data yang diperoleh secara langsung dari lapangan yaitu di desa Jembatan Merah, Kecamatan Tomilito, Kabupaten Gorontalo Utara dan melalui informan. Data primer ini berupa pedoman wawancara yaitu daftar pertanyaan yang ditujukan kepada informan dalam hal ini kepala desa maupun pihak-pihak yang terkait dengan proses pengawasan tersebut.

#### **2. Data Sekunder**

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari hasil mempelajari dan menelaah berbagai literatur yang ada sesuai topik penelitian, selain itu juga dapat diperoleh melalui pihak pemerintah desa Jembatan Merah yang berhungan dengan penelitian ini yaitu pengawasan dalam pelaksanaan pembangunan draenase di desa Jembatan Merah.

### **3.5 Teknik Pengumpulan Data**

1. Instrumen penelitian adalah berupa alat bantu yang digunakan dalam kelancaran penelitian. Adapun instrument yang digunakan dalam penelitian ini yaitu : *observasi*.observasi atau pengamatan adalah teknik pengamatan yang dilakukan di desa Jembatan Merah, dengan jalan mengamati objek penelitian sehingga dapat dipertanggung jawabkan.

## 2. Interview/wawancara

Wawancara merupakan cara pengumpulan data melalui kegiatan tanya jawab secara langsung dengan informan untuk memperoleh informasi yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

## 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data penelitian yang dilakukan menelusuri data yang tersedia dalam bentuk surat-surat, buku-buku atau catatan-catatan, laporan-laporan dan sebaginya.

### **3.6 Analisis data**

Sugiyono (2013 : 91)"mengatakan bahwa analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu, pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai, bila jawaban yang diwawancarai setalah, dianalisi terasa belum meuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi, sampai tahap tertentu, diperoleh data yang dianggap kredibel."

Miles and Huberman dalam Sugiyono (2013 : 91)"mengemukakan bahwa aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu data *reduction*, data *display*, dan *conclusiondrawing/verification*."

Proses ini kualitatif dalam penelitian ini, dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yakni hasil wawancara, pengamatan yang

sudah dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen dan sebagainya. Setelah dibaca dipelajari dan ditelaah, maka langkah selanjutnya ialah mengadakan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

### 1. Pengumpulan data

Pengumpulan data yaitu mengumpulkan data lalu dipilah-pilah data yang nantinya akan menjadi objek penelitian. Namun ini adalah langkah yang paling strategis dalam suatu penelitian. Sebagaimana hakekatnya, tujuan dari penelitian itu sendiri adalah mendapatkan suatu data yang menjadi sumber dari penelitian. Hal ini dapat dilakukan dengan berbagai cara dan berbagai sumber.

### 2. Reduksi data

Reduksi data yaitu memilah-milah data, pemusatan perhatian serta penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data dilakukan peneliti dengan cara menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasikan data dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi oleh peneliti.

Dalam penelitian ini, proses reduksi data dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut.

- a. Mengecek nama dan kelengkapan identitas informan dan mengecek sejauh mana kelengkapan informasi data yang diberikan.

- b. Mengecek kelengkapan instrumen (daftar pertanyaan) sesuai dengan indikator kineerja. Setiap indikator dipisahkan lalu disatukan dengan jawaban yang diberikan oleh informan.

### 3. Penyajian Data

Dalam penyajian data peneliti mengumpulkan informasi yang tersusun yang memberikan dasar pijakan kepada peneliti untuk melakukan suatu pembahasan dan pengambilan kesimpulan. Penyajian ini, kemudian untuk menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang terpadu sehingga mudah diamati apa yang sedang terjadi kemudian menentukan penarikan kesimpulan secara benar.

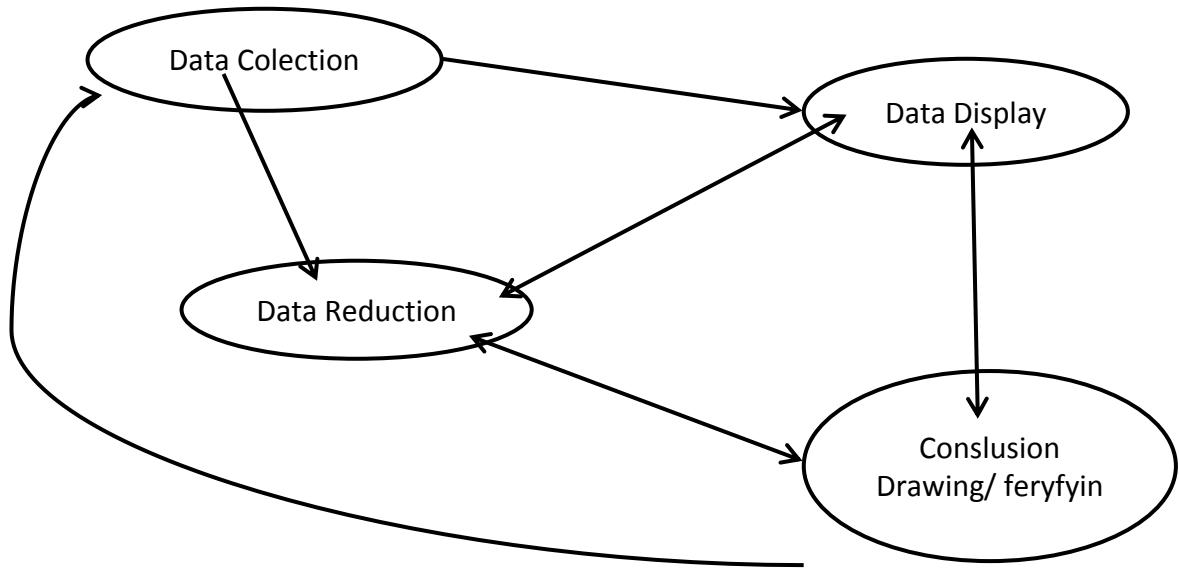
### 4. Menarik Kesimpulan / Verifikasi

Penarikan kesimpulan adalah suatu kegiatan dari konfigurasi yang utuh. Kesimpulan juga diverifikasi oleh peneliti selama penelitian berlangsung. Verifikasi itu mungkin sesingkat pemikiran kembali yang melintas dalam pemikiran peneliti, suatu tinjauan ulang pada catatan lapangan atau mungkin menjadi begitu seksama dan makan tenaga dengan peninjauan kembali atau juga upaya-upaya yang luas untuk menempatkan salinan suatu temuan dalam seperangkat data yang lain.

Telah dikemukakan empat hal utama yang merupakan komponen analisis yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan sebagai suatu yang saling terkait pada saat sebelum, selama dan sesudah pengumpulan data dalam bentuk yang sejajar untuk membangun wawasan umum yang disebut

dengan analisis. Empat jenis kegiatan analisis dan kegiatan pengumpulan data merupakan suatu proses sirkus dan interaktif, dapat dilihat gambar berikut ini :

Gambar 6.1b Komponen dalam analisis data (*Interactive model*)



Sumber : Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2013 : 92)

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

Desa dambalo adalah sebuah desa yang letaknya berada di kawasan timur kecamatan kwandang (induk dari kecamatan tomilito) juga merupakan desa yang memiliki luas terbesar ke dua dari beberapa desa yang ada di kecamatan kwandang, dihuni oleh masyarakat yang terdiri dari beberapa golongan, suku, agama dan ras yang bermukim disepanjang jalan trans sulawesi dan lereng-lereng serta gunung yang tersebar dalam 7 (tujuh) Dusun yaitu Dusun Jembatan Merah, Dusun Hukulo, dusun Milango, Dusun Bubode, Dusun Leato dan Dusun Somulango. Semua dusun tersebut adalah satu kesatuan utuh dalam wilayah hukum Desa Dambalo, Kecamatan Kwandang.

Dalam proses pembentukan dan pemberian nama desa terjadi sedikit perdebatan antar masyarakat dengan menawarkan beberapa nama sebagai berikut:

- 1. Dusun Orange** dengan alasan di desa tersebut peninggalan penjajah Belanda yakni berupa sebuah benteng yang dikenal dengan Benteng Orange.
- 2. Dusun Lilomonu** dengan alasan bahwa dikawasan dusun tersebut ada sebuah tempat dibagian hulu sungai yang konon menurut sejarah dan pengakuan orang-orang tua menjadi tempat turun dan mandinya para bidadari dari kayangan yang terbukti dengan air yang berada dikawasan tersebut sering berbau harum.

**3. Dusun Gudang Arang** kenapa nama ini muncul sebab pada masa pendudukan penjajah disebuah lokasi pesisir yang saat ini dikenal dengan nama dusun gudang arang adalah sebuah tempat dimana menjadi pelabuhan bagi kapal-kapal penjajah yang mengangkut arang dam menupuk dikawasan tersebut. Dari ketiga nama yang ditawarkan tersebut semuanya dimentahkan dan tidak diterima masyarakat. Hingga akhirnya munculah nama lain yaitu:

**Desa Jembatan merah** adalah sebuah nama yang memiliki nilai historis yang tinggi dan dianggap patut dinamakan sebuah desa oleh masyarakat dengan alasan sebagai

**b. Sejarah Pemerintahan Desa Jembatan Merah**

Desa Jembatan Merah adalah Desa yang baru mekar yaitu pemekaran dari Desa Dambalo maka penyusunan laporan ini merupakan laporan awal Desa, dapat digambarkan dalam daftar dibawah:

NO	N A M A	T A H U N	KETERANGAN
1.	BARLIAN LINGGUDE	2010 - 2011	Masih Hidup
2.	RAMIN SULEMAN	2011 – s/d 2017	Masih Hidup
3.	ISMIATI HATIBIE, S.STP, M.Si	2017 s/d 2018	Masih Hidup
3.	SJAHRUDIN TAKULA	2018 s/d 2024	Masih Hidup

### **c. Sejarah Pembangunan Desa Jembatan Merah**

Dalam hal pembangunan fisik, pada tahun 2013 Desa Jembatan Merah mendapatkan proyek yang cukup banyak meliputi pembenahan lingkungan perumahan, pembenahan jalan, pembenahan / normalisasi sungai penunjang sarana dan prasarana pendidikan.

#### **2.1.2 Kondisi Geografis**

Desa Jembatan Merah terletak di sebelah barat dari Ibukota Kecamatan dengan luas wilayah  $\pm$  8.000 Ha ( $\pm$  8 km<sup>2</sup>) pada ketinggian 100 – 200 m di atas permukaan laut (DPL). Suhu rata-rata harian berkisar antara 25°C sampai dengan 30°C. Curah hujan rata-rata 120 mm/tahun.

Keadaan tipografi di dominasi oleh kemiringan 10– 45° dengan jenis tanah yang sering mengalami erosi, sedangkan kondisi dan struktur utama geologi adalah patahan yang berpotensi menimbulkan gerakan tektonik sehingga menyebabkan rawan bencana alam seperti gempa bumi, gerakan tanah, erosi serta pendangkalan dan banjir.

Desa Jembatan Merah terbagi menjadi 4 (empat) dusun, yaitu Dusun Orange, Dusun Lilomono, Dusun Gunung Potong dan Dusun Gudang Arang. Wilayah Desa Jembatan Merah disebelah Utara berbatasan dengan Laut Sulawesi, di sebelah Timur berbatasan dengan Desa dambalo dan Desa Leyao, disebelah Selatan berbatasan dengan Desa Titidu dan Desa Masuru dan disebelah Barat berbatasan dengan Desa Moluo dan Desa Katialada. Dilihat dari tata guna tanah, Desa Jembatan Merah terbagi sebagai berikut : pemukiman  $\pm$ 239 Ha, infrastruktur perkantoran  $\pm$  20 m<sup>2</sup>, jalan desa  $\pm$  6 Ha.

Dari segi orbitasi atau jarak Desa dengan pusat Pemerintahan, jarak dengan Kecamatan Tomilito 7 km, jarak dengan Kabupaten Gorontalo  $\pm$  23 km dan jarak dengan Provinsi Gorontalo  $\pm$  64 km. kenderaan umum yang digunakan sebagai sarana angkutan ke pusat pemerintahan adalah kenderaan bermotor.

#### **4.2 Hasil Penelitian Dan Pembahasan**

##### **4.2.1 Komunikasi Sebagai Faktor Yang Menghambat Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan Desa**

Komunikasi yang terjalin antara atasan dan bawahan adalah komunikasi dua arah yang bisa membangun, melalui musyawarah mufakat untuk mewujudkan pembangunan yang telah direncanakan bersama. Berdasarkan observasi peneliti komunikasi antara kepala desa dengan aparat desa dan masyarakat cukup baik, sebagaimana hasil wawancara peneliti dengan salah seorang aparat Desa Jembatan Merah terkait dengan komunikasi, mengatakan bahwa: “Sejauh ini komunikasi yang dibangun pemerintah desa dengan masyarakat berjalan baik-baik saja. Baik itu dalam forum resmi dan tidak resmi. Forum resminya kami adakan musyawarah tingkat desa secara berkala, misalnya musrenbangdes yang dilaksanakan pada setiap awal tahun dalam rangka menyampaikan gagasan-gagasan pembangunan Desa Jembatan Merah dan menampung aspirasi masyarakat.”(P-03 Wawancara 4 Februari 2021).

Disamping itu peneliti juga mewawancarai salah seorang masyarakat Desa Jembatan Merah terkait partisipasi masyarakat dalam pembangunan yang mengatakan bahwa:

“Sejauh ini sebenarnya efektivitas pembangunan di Desa kami masih berjalan biasa-biasa saja. Selama 10 tahun terakhir tidak ada yang istimewa atau gebrakan yang dibuat oleh pemerintah desa. Tapi bukan berarti pembangunan itu tidak ada. Melainkan hanya biasa-biasa saja. (M-01 Wawancara 8 Februari 2021)

Berhasil tidaknya pengawasan pembangunan disuatu daerah, sebagian besar tergantung pada pemerintah daerah itu sendiri. Dan yang tidak kala pentingnya adalah partisipasi masyarakat daerah yang bertindak sebagai subyek pembangunan daerahnya. Menurut Josef Riwu Kaho (2010 : 71) berhasil tidaknya seorang yang menjabat sebagai kepala daerah tergantung kepada kualitas yang dimiliknya.

Selain itu Handoko (2003 : 361) juga mengemukakan bahwa, ada tiga tipe dasar pengawasan yaitu: 1) Pengawasan pendahuluan (feed forward control). Pengawasan pendahuluan atau sering disebut steering controls, dirancang untuk mengantisipasi masalah-masalah atau penyimpang-penyimpangan dari standar atau tujuan dan memungkinkan koreksi dibuat sebelum suatu tahap kegiatan tertentu diselesaikan; 2) Pengawasan yang dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan kegiatan (concurrent control). Pengawasan ini sering disebut pengawasan “ ya-tidak ”, screening control atau “berhenti-terus”, dilakukan selama suatu kegiatan berlangsung; 3) Pengawasan umpan balik (feedback control). Pengawasan umpan balik, juga dikenal sebagai fast-action control. Mengukur hasil-hasil dari suatu kegiatan yang telah diselesaikan.

#### **4.2.2 Kepemimpinan Sebagai Faktor Yang Menghambat Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan Desa**

Kepemimpinan merupakan faktor yang sangat berperan dalam sebuah organisasi, kepemimpinan yang baik adalah kepemimpinan yang dapat memberikan kesempatan kepada bawahan untuk menyampaikan pendapatnya. Kepemimpinan seperti ini lebih dikenal dengan kepemimpinan demokratis. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan sekretaris Desa Jembatan Merah tentanggaya kepemimpinan kepala desa, mengatakan bahwa: “Saya piker kepala desa kami sudah melaksanakan tugasnya dengan baik. Nah ukuran baik buruknya kinerja pimpinan adalah respon dari masyarakat kami sendiri. Merekalah yang lebih objektif menilai kinerja aparat Desa Jembatan Merah terhadap program pembangunan yang sudah kami jalankan. Tetapi keluhan-keluhan yang dating selama ini alhamdulillah bisa kami selesaikan dengan baik pula. (P-01/Wawancara 5 Februari 2021)

Tanggapan lain dari masyarakat yang merupakan tokoh karang taruna Desa Jembatan Merah berikut wawancara dengan beliau :

“Desa Jembatan Merah selama ini saya nilai dari kunitas terpenuhi dengan baik. Hanya saja dari aspek kualitas mungkin agak kurang dalam akselarasi pembangunannya. Misalnya pembangunan drainase yang sangat membantu ketika musim penghujan datang. Tapi kalo saya pribadi menganggap hal ini mungkin karena banyak keterbatasan anggaran. Apalagi sejak tahun lalukan anggaran banyak yang digeser akibat pandemic Covid-19. (M-02/Wawancara 8 Februari 2021)

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan informan diatas jelas terlihat bahwa faktor pemimpin sangat mempengaruhi proses pengawasan. Menurut Tead dalam Syafiie (2011 : 40) kepemimpinan sebagai perpaduan perangi yang memungkinkan seseorang mampu mendorong pihak lain menyelesaikan tugasnya. Sedangkan menurut Pigors dalam Syafiie (2011 : 40) kepemimpinan adalah suatu proses saling mendorong melalui keberhasilan interaksi dari perbedaan individu, mengontrol daya manusia dalam mengajak tujuan bersama.

Berhasil tidaknya pengawasan pembangunan disuatu daerah, sebagian besar tergantung pada pemerintah daerah itu sendiri. Dan yang tidak kala pentingnya adalah partisipasi masyarakat daerah yang bertindak sebagai subyek pembangunan daerahnya. Menurut Josef Riwu Kaho (2010 : 71) berhasil tidaknya seorang yang menjabat sebagai kepala daerah tergantung kepada kualitas yang dimiliknya.

Dengan melihat uraian diatas maka peneliti berpendapat bahwa pemimpinlah yang sangat menentukan berhasil tidaknya suatu pembangunan di Desa Jembatan Merah, Karena apabila seorang pemimpin itu tidak mampu mengemudikan pemerintahannya tentunya pemerintahan yang dijalankannya jadi tidak maksimal, maka sebab itu seorang pemimpin haruslah seorang yang mampu dan bertanggung jawab terhadap pekerjaannya.

#### **4.2.3 Kecenderungan Masyarakat Menunggu Bantuan Sebagai Faktor Yang Menghambat Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan Desa**

Tidak dapat bisa kita pungkiri bahwa salah satu karakteristik masyarakat Indonesia terutama di daerah-daerah adalah mentalitas ingin mendapatkan bantuan pemerintah. Terlepas dari usaha-usaha mereka dalam menghidupi perekonomian keluarga, masyarakat juga masih banyak yang memiliki mentalitas ingin dibantu dari pada berusaha sendiri.

Berikut ini wawancara dengan Kepala Desa Jembatan Merah yang mengatakan bahwa:

“Alokasi Dana Desa yang bersumber dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah itu tidak semuanya digunakan dalam bentuk pembangunan fisik. Kita ada Juknisnya yang mengatur. Tidak bisa semau-maunya kita saja. Pemberdayaan masyarakat juga merupakan program pemerintah pusat yang dititipkan melalui Alokasi Dana Desa. Tetapi hal ini terkadang tidak disadari oleh masyarakat kami sendiri, yang terkadang ingin diikuti seluruhnya aspirasi mereka. (P-04/Wawancara 4 Februari 2021)

Menurut Kaho (2010 : 281-287) ada beberapa yang membantu pengawasan dalam otonomi daerah yaitu:

1. Partisipasi masyarakat, salah satu wujud rasa tanggung jawab dimaksudkan adalah adanya sikap mendukung dari anggota masyarakat Daerah terhadap penyelenggaraan otonomi daerah yang ditunjukan dengan adanya partisipasi aktif masyarakat desa.

2. Faktor keuangan, keberhasilan penyelenggaraan otonomi Daerah tidak dapat dilepas dari cukup tidaknya kemampuan daerah dalam bidang keuangan karena kemampuan keuangan ini merupakan salah-satu indikator penting guna mengukur tingkat ekonomi suatu daerah.
3. Faktor peralatan, peralatan merupakan instrumen dan pembantu bagi aparatur pemerintah daerah dalam melaksanakan berbagai tugas pekerjaannya, karena itulah peralatan mendukung posisi penting pula.
4. Faktor organisasi dan manajemen, untuk dapat mewujudkan suatu organisasi yang baik dan sehat maka dalam setiap organisasi perlu diterapkan asas-asas atau prinsip-prinsip tertentu, karena asas ini merupakan sarana perantara guna menciptakan iklim yang favourable bagi terwujudnya tujuan organisasi secara keseluruhannya.

Dengan melihat uraian diatas peneliti menyimpulkan bahwa faktor yang menghambat pengawasan sebenarnya ada pada diri kita sendiri. Walaupun peralatan tidak secanggih mungkin, walaupun partisipasi masyarakat tidak terlalu mendukung, walaupun tidak ada undang-undang yang mengatur, tetapi kalau kita memang sudah ada niat baik tentunya proses pembangunan yang baik itu tak perlu diawasi. Tetapi itulah manusia mereka tidak bakalan kerja dengan baik kalau tidak diawasi, maka dari itu partisipasi, peralatan, dan peraturan undang-undang tentang pengawasan sangat dibutuhkan karena guna mencapai pelaksanaan organisasi yang baik.

#### **4.2.4 Tingkat Pendidikan Masyarakat Sebagai Faktor Yang Menghambat Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan Desa**

Rendahnya tingkat tingkat pendidikan merupakan salah satu faktor penghambat dalam penyampaian informasi pembangunan kepada masyarakat. Tingkat pemahaman masyarakat yang memiliki tingkat pendidikan yang rendah akan sulit memahami penyampaian yang diberikan kepadanya.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan salah seorang aparatur desa terkait dengan tingkat Pendidikan masyarakat mengatakan bahwa:

“Memang tidak bisa kita pungkiri bahwa tingkat pendidikan masyarakat kita rata-rata masih dibawah. Dimana lulusan SD dan SMA lebih mendominasi. Demikian pula lulusan Sarjana masih sangat kurang di desa kami. Sehingga faktor Pendidikan juga menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah desa untuk menjelaskan pembangunan kepada masyarakat dengan berbagai metode sampai masyarakat kami akan paham. (P-06 Wawancara 5 Februari 2021)

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan informan maka peneliti dapat melihat bahwa pemerintah desa jembatan merah kiranya perlu memperhatikan keterbatasan sumberdaya manusia yang professional, juga keterbatasan sumber sumber dana yang dimiliki desa, baik dana mandiri desa maupun dana bantuan pemerintah pusat. Tidak kalah pentingnya adalah membangun kreativitas dan partisipasi masyarakat agar lebih kritis dan rasional.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian maka penulis dapat menyimpulkan bahwa:

1. Pengawasan dalam pelaksanaan pembangunan di desa jembatan merah kecamatan tomilito sudah berjalan dengan baik walaupun masih terdapat kekurangan sehingga belum maksimal, sehingga diperlukan pembenahan baik dari sumber daya manusianya maupun sumber dana yang dikelola oleh desa.
2. Faktor faktor yang menghambat pengawasan pelaksanaan pembangunan didesa jembatan merah kecamatan tomilito adalah rendahnya tingkat pendidikan, kurangnya sumberdaya manusia yang professional serta sumber dana yang dikelola masih belum memadai.

#### **5.2 Saran**

Berdasarkan kesimpulan diatas maka disarankan kepada pemerintah desa jembatan merah kecamatan tomilito kabupaten gorontalo utara untuk melakukan langkah langkah berikut :

1. Agar lebih meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam hal ini aparat pemerintah desa.
2. Meningkatkan tingkat pendidikan masyarakat desa jembatan merah agar dapat turut serta dalam pengawasan pelaksanaan pembangunan desa.

## DAFTAR PUSTAKA

- Deddy Ismatullah, 2010, *Otonomi Daerah dan Desentralisasi, Dilengkapi Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Perubahan-perubahannya*, Penerbit CV. Pustaka Bandung
- George R. Terry. Dan Winardi, 2006, *Asas-Asas Menejemen*, PT Alumni, Bandung
- Hani Handoko, 2003, *Menejemen Edisi 2*, BPFE Yogyakarta
- Haw Widjaja, 2010, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Asli, Bulat dan Utuh*, PT. Raja Grafindo, Jakarta
- Inu Kencana Syafie, 2011, *Manajemen Pemerintahan*, Penerbit Pustaka Reka Cipta, Bandung-Jawa Barat
- Josef Riwu Kaho, 2010, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada Jakarta
- Miftah Thoha, 2010, *Kepemimpinan dalam Manajemen*, PT. Raja Grafindo, Jakarta
- Sugiono, 2013, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Penerbit CV. Alvabeta Bandung
- Tulus T.H. Tambunan, 2001, *Perekonomian Indonesia*, Ghalia Indonesia
- Perundang-undangan**
- Undang-undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Otonomi Daerah
- Undang-undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Himpunan Peraturan Perundang-undangan Pemerintah Desa dan Kelurahan.

Lampiran Pedoman Wawancara:

**PENGAWASAN DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN**  
*(Studi kasus pembangunan di Desa Jembatan Merah, Kecamatan Tomilito  
Kabupaten Gorontalo Utara)*

Nama Peneliti : Rezki Ahmad  
NIM : S2117130  
Prodi : Ilmu Pemerintahan

**IDENTITAS INFORMAN**

Nama (boleh tidak di isi) :  
Umur : Tahun  
Jenis Kelamin : Laki-laki  Perempuan   
Pendidikan Terakhir :  
Masa Kerja :

**PETUNJUK PENGISIAN**

- Mohon dengan hormat bantuan dan kesediaan Bapak/Ibu/Saudara (i) untuk menjawab seluruh pertanyaan yang disediakan.
- Berilah jawaban yang Bapak/Ibu/Saudara (i) anggap paling benar sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

A. Pengawasan Pemerintah Desa, Dan Tokoh-Tokoh Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Pemabangunan Di Desa Jembatan Merah.

**a. Pertanyaan untuk Kepala Desa Dan Aparat:**

1. Bagaimana kinerja aparat desa, terutama dari Sekretaris desa dan juga kaur yang berada dibawah pemerintahan kepala desa?
2. Bagaimana bentuk penanganan konflik pembuatan drainase yang terjadi di dalam masyarakat?
3. Apa saja kendala dalam penyelenggaraan pemerintah dalam pembangunan pembuatan drainase?

**b. Pertanyaan Untuk Masyarakat Umum Desa Jembatan Merah:**

1. Bagaimana pertanggungjawaban kepala desa terhadap pembangunan drainase yang dibutuhkan oleh masyarakat?

2. Bagaimana pemerintahan desa meningkatkan partisipasi dalam pembangunan drainase desa?
3. Bagaimana Bentuk transparansi dalam proses pembangunan di Desa Jembatan Merah yang selama ini dilakukan terhadap pembangunan drainase?
4. Bagaimana Pendapat Anda Hubungan kepala desa dengan BPD di Desa Jembatan Merah?
5. Apa saja keluhan masyarakat kepada pemerintah desa terhadap pembangunan drainase desa? (Masyarakat)

**B. Faktor- apa yang menghambat pemerintah desa, dan tokoh-tokoh masyarakat dalam proses pengawasan pelaksanaan pembangunan di Desa Jembatan Merah.**

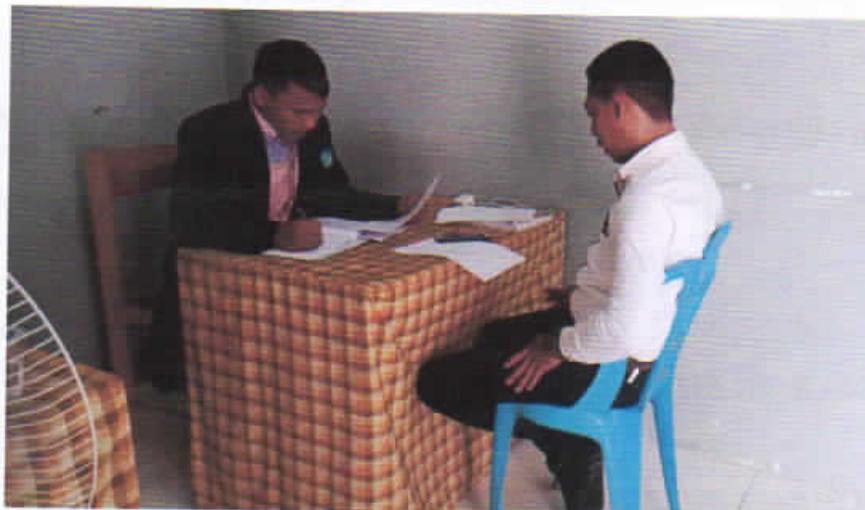
**a. Pertanyaan Untuk Masyarakat Umum Desa Jembatan Merah:**

1. Bagaimana tanggapan anda terkait peran SDM Ararat desa dalam pembangunan di Desa Jembatan Merah?
2. Bagaimana Gaya Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Menanggapi Aspirasi Masyarakat?
3. Bagaimana Bentuk Motivasi Dari Aparatur Desa Kepada Masyarakat Terhadap Pembangunan Drainase?

**b. Pertanyaan Untuk Aparat Desa Jembatan Merah**

1. Faktor Apa Yang Menjadi Hambatan Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Drainase Desa?
2. Bagaimana Sikap Masyarakat Terhadap Pembangunan Drainase Desa?

## LAMPIRAN DOKUMENTASI PENELITIAN





**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
LEMBAGA PENELITIAN (LEMLIT)  
UNIVERSITAS IHSAN GORONTALO**

Jl. Raden Saleh No. 17 Kota Gorontalo  
Telp: (0435) 8724466, 829975; Fax: (0435) 82997;  
E-mail: [lembagapenelitian@unisan.ac.id](mailto:lembagapenelitian@unisan.ac.id)

Nomor : 3227/PIP/LEMLIT-UNISAN/GTO/XII/2020

Lampiran : -

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Kepala Desa Jembatan Merah

di,-

Kab. Gorontalo Utara

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Zulham, Ph.D  
NIDN : 0911108104  
Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian

Meminta kesediannya untuk memberikan izin pengambilan data dalam rangka penyusunan **Proposal / Skripsi**, kepada :

Nama Mahasiswa : Reski Ahmad  
NIM : S2117130  
Fakultas : Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Lokasi Penelitian : DESA JEMBATAN MERAH KEC. TOMILITO KAB. GORONTALO UTARA  
Judul Penelitian : PENGAWASAN DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN (STUDI KASUS PEMBANGUNAN DI DESA JEMBATAN MERAH KEC. TOMILITO KAB. GORONTALO UTARA)

Atas kebijakan dan kerja samanya diucapkan banyak terima kasih.



+



**DEMEDEINAH KABUPATEN GORONTALO UTARA  
KECAMATAN TOMILITO  
DESA JEMBATAN MERAH**

Alamat : Jln. Trans Sulawesi, Kompleks SATRADAR 224, Telp. - Kode Pos 96252

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 140/JMR- 4 /III/2021

Sesuai dengan Surat Permohonan Izin Penelitian Tugas Akhir Sdr (i) **RESKI AHMAD** Mahasiswa Universitas Ichsan Gorontalo tertanggal 04 Januari 2021, maka dengan ini Saya menerangkan bahwa :

Nama	: RESKI AHMAD
Nim	: S.21.17.130
Jurusan	: Pemerintahan
Fakultas	: Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas	: Ichsan Gorontalo

Benar-benar melakukan Penelitian di Desa Jembatan Merah Kecamatan Tomilito Kabupaten Gorontalo Utara mulai Januari 2021 s/d Selesai dengan Judul Skripsi : **“Pengawasan Dalam Pelaksanaan (Studi Kasus Pembangunan di Desa Jembatan Merah Kecamatan Tomilito Kabupaten Gorontalo Utara)”**.

Demikian surat keterangan ini dibuat atas perhatian kami ucapan terima kasih.





**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS ICHSAN  
(UNISAN) GORONTALO**

SURAT KEPUTUSAN MENDIKNAS RI NOMOR 84/D/O/2001  
Jl. Achmad Nadjamuddin No. 17 Telp (0435) 829975 Fax (0435) 829976 Gorontalo

**SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI**

No. 0586/UNISAN-G/S-BP/V/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sunarto Taliki, M.Kom  
NIDN : 0906058301  
Unit Kerja : Pustikom, Universitas Ihsan Gorontalo

Dengan ini Menyatakan bahwa :

Nama Mahasiswa : RESKI AHMAD  
NIM : S2117130  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan (S1)  
Fakultas : Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik  
Judul Skripsi : PENGAWASAN DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN (Studi Kasus Pembangunan Di Desa Jembatan Merah Kecamatan Tomilito Kabupaten Gorontalo Utara)

Sesuai dengan hasil pengecekan tingkat kemiripan skripsi melalui aplikasi Turnitin untuk judul skripsi di atas diperoleh hasil Similarity sebesar 35%, berdasarkan SK Rektor No. 237/UNISAN-G/SK/IX/2019 tentang Panduan Pencegahan dan Penanggulangan Plagiarisme, bahwa batas kemiripan skripsi maksimal 35% dan sesuai dengan Surat Pernyataan dari kedua Pembimbing yang bersangkutan menyatakan bahwa isi softcopy skripsi yang diolah di Turnitin SAMA ISINYA dengan Skripsi Aslinya serta format penulisannya sudah sesuai dengan Buku Panduan Penulisan Skripsi, untuk itu skripsi tersebut di atas dinyatakan BEBAS PLAGIASI dan layak untuk diujangkan.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Gorontalo, 01 Mei 2021  
Tim Verifikasi,



Sunarto Taliki, M.Kom

NIDN. 0906058301

Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Program Studi
3. Pembimbing I dan Pembimbing II
4. Yang bersangkutan
5. Arsip



S2117130

# SKRIPSI\_Reski Ahmad. Nim S2117130. Pengawasan Dalam Pela...

## Sources Overview

35%

OVERALL SIMILARITY

1	www.scribd.com	5%
2	repository.unhas.ac.id	4%
3	yukjoinus.blogspot.com	4%
4	pt.scribd.com	4%
5	id.scribd.com	3%
6	ikhwanul-khair.blogspot.com	3%
7	repository.stiedewantara.ac.id	2%
8	rodial.blogspot.com	2%
9	trisnoku-tulangbawang.blogspot.com	2%
10	wartawarga.gunadarma.ac.id	2%
11	eprints.ums.ac.id	1%
12	repository.uin-suska.ac.id	<1%
13	repository.unri.ac.id	<1%
14	fajarsodiq.blogspot.com	<1%
15	Zhendy Citra Larrynsia Wijanarko. "PENGARUH PENGAWASAN PIMPINAN TERHADAP DISIPLIN KERJA KARYAWAN PADA PABRIK ME...	<1%
16	jurnal.umrah.ac.id	<1%

**Excluded search repositories:**

- None

**Excluded from Similarity Report:**

- Bibliography
- Quotes
- Small Matches (less than 25 words).

**Excluded sources:**

- None

## ABSTRAK

### RESKI AHMAD. S2117130. PENGAWASAN DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN (STUDI KASUS PEMBANGUNAN DI DESA JEMBATAN MERAH KECAMATAN TOMILITO KABUPATEN GORONTALO UTARA)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengawasan dalam pelaksanaan pembangunan di desa Jembatan Merah Kecamatan Tomilito Kabupaten Gorontalo Utara. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Kepala Desa sebagai pemimpin formal yang merupakan administrator pembangunan mempunyai peranan yang sangat penting dalam membutuhkan, menggerakkan dan meningkatkan partisipasi masyarakat untuk ikut aktif dalam kegiatan pembangunan desa. Oleh karena itu, diperlukan Kepala Desa yang cakap, jujur, bijaksana dan mempunyai pengetahuan dan keterampilan dalam menyelenggarakan pemerintahan desa serta dilengkapi dengan perangkat desa yang berkualitas; 2) Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan dana bantuan Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara yang dimaksudkan untuk membiayai program pemerintah desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintah dan pemberdayaan masyarakat, karena dengan bantuan ini dapat membantu terlaksananya pembangunan desa dalam hal pembiayaan atau pembangunan. Tingkat pendapatan yang dimiliki oleh suatu masyarakat akan mempengaruhi tingkat partisipasi mereka dalam pembangunan desa, khususnya dalam bentuk swadaya uang. Seperti yang ada di Desa Jembatan Merah dimana tingkat pendapatan masih rendah, hal ini berpengaruh terhadap tingkat partisipasinya masih rendah atau kurang; 3) Pendidikan juga mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa, dimana masyarakat yang berpendidikan tinggi dapat membantu memudahkan upaya Kepala Desa dalam menyampaikan informasi tentang program pembangunan, dan disisi lain masyarakat berpendidikan rendah sangatlah membantu dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan pembangunan dalam hal partisipasi dalam bentuk tenaga.

Kata Kunci: Pengawasan, pembangunan Desa



## ***ABSTRACT***

### ***RESKI AHMAD. NIM S2117130. THE SUPERVISION OF DEVELOPMENT IMPLEMENTATION (A CASE STUDY ON THE JEMBATAN MERAH VILLAGE DEVELOPMENT PROJECT, TOMILITO SUBDISTRICT, NORTH GORONTALO DISTRICT)***

*The research is aimed at finding the supervision of development implementation at Jembatan Merah village, Tomilito Subdistrict, North Gorontalo District. The type of method used is the qualitative research with descriptive approach. The findings of the research indicate that 1) The Village Chief as a formal leader or the development project administrator has a very important role in requiring, mobilizing, and improving the participation of the people to actively contribute to the development project in their local village. Therefore, a need towards a competent, accountable, wise, knowledgeable and reliable chief of village must be supported by the qualified staffs of the village, 2) the Allocation of Village Fund is the aid from the Local Government of North Gorontalo District intended to fund the programs of local village government in their programs and in community development projects since the aid can help fund them to be realized. The amount of revenue within a community can affect the rate of their participation in local village development project particularly in the form of fundraising. This can be seen in the Village of Jembatan Merah where since the income rate is still relatively low, people's participation is, in consequence, insufficient. 3) Education also effects the rate of participation of the community in the local development project where high educated people can help the chief of the village in conveying the information regarding the development program and on the other side, low educated people are have high contribution in the local development project in the form of physical and labor participation.*

*Keywords: Supervision, Village development*



## CURICULUM VITAE

### A. Identitas

Nama	: RESKI AHMAD
Nama Panggilan	: Eki
Nim	: S.21.17.130
Tempat Tanggal Lahir	: Kwandang, 13 Mei 1997
Jenis kelamin	: Laki-Laki
Angkatan Keempat	: Tahun 2017
Fakultas	: Ilmu Sosil dan Ilmu Politik
Jurusan	: Ilmu Pemerintahan
Status	: Mahasiswa Karyawan
Agama	: Islam
Alamat	: Desa Jembatan Merah, Kec. Tomilito Kabupaten Gorontalo Utara
Nama Ayah	: Irfan Ahmad
Nama Ibu	: Hapsa Tahidina
Jumlah Saudara Kandung	: 2 Orang
Nama Adik	: 1. Yuzlan Ahmad 2. Yuli Ahmad



### A. Riwayat Pendidikan

1. SDN 3 DAMBALO Lulus Pada Tahun 2010
2. SMPN 1 KWANDANG Lulus Pada Tahun 2013
3. SMA NEGERI 1 KWANDANG Lulus Pada Tahun 2016